

## BERINVESTASI DALAM INFRASTRUKTUR : PERAN KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN

Ernawati<sup>1</sup>, Rara Kembang Mustika<sup>2</sup>, Edo Alex Sander Lumbantobing<sup>3</sup>, Vivian Aprilia Maulida<sup>4</sup>, Deris Desmawan<sup>5</sup>

[5553230013@untirta.ac.id](mailto:5553230013@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [5553230016@untirta.ac.id](mailto:5553230016@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [5553230025@untirta.ac.id](mailto:5553230025@untirta.ac.id)<sup>3</sup>,  
[5553230022@untirta.ac.id](mailto:5553230022@untirta.ac.id)<sup>4</sup>, [deridesmawan@untirta.ac.id](mailto:deridesmawan@untirta.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### Abstrak

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekamomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Sumber dana dari pemerintah tidak cukup, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, di satu sisi swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan, serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Tulisan ini menganalisis strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada kendala yang dihadapi selama ini, maka strategi yang dirumuskan antara lain adalah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta, dan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Pemerataan Ekonomi, Peran Swasta, Biaya Pembangunan Infrastruktur.

### Abstract

*Currently, the government is aggressively accelerating infrastructure development in various regions as an effort to equalize the economy. However, the costs required for developing this infrastructure are not small. Funding sources from the government are insufficient, so the role of the private sector is needed to participate in financing infrastructure development. However, on the one hand, the private sector is still reluctant to invest in infrastructure because there is no certainty regarding planning, regulations and financing schemes, as well as major obstacles in terms of land acquisition and licensing. This paper analyzes strategies to increase the role of the private sector in infrastructure development. By referring to the obstacles faced so far, the strategies formulated include improving coordination between stakeholders, improving the quality of project planning, facilitating regulations related to land acquisition and licensing, fiscal incentives, increasing government guarantees for swasta, and better infrastructure financing schemes effective.*

**Keywords:** Economic Equity, Private Role, Infrastructure Development Costs.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai penyedia pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi masyarakat di seluruh negeri ini. Namun penyediaan pelayanan infrastruktur tersebut membutuhkan dana atau pendanaan yang sangat besar. Oleh karena itu, peranan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan pendanaan didalam pembangunan pelayanan infrastruktur. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pelayanan infrastruktur diharapkan mampu mengisi celah kesenjangan dalam masalah pendanaan, dan juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemampuan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru.

Bidang infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama

sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan infrastruktur ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 — 2014, Memperkuat Pembangunan Antar Bidang, Buku II hlm.1.).

Selain itu, diperlukan pula pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan terhadap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini semakin meningkat.

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari Pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, suatu negara diindikasikan telah berhasil melakukan Pembangunan ekonomi apabila negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Menurut sudono sukirno (2006). Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai Upaya atau usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi rill ini dengan melakukan penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi, dan meningkatkan standar manajemen. Guna menjalankan proses pembangunan ekonomi, banyak factor yang menentukan keberhasilan dari Pembangunan tersebut salah satunya yaitu pembentukan modal misalnya infrastruktur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Yang dipakai dalam artikel ini yaitu studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada analisis dan sintesis berbagai sumber literatur, termasuk artikel ilmiah, laporan pemerintah, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis informasi yang relevan dan data sekunder yang berkaitan dengan peran kemitraan swasta dalam Pembangunan ekonomi. Peneliti akan memulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Setelah melalui proses identifikasi sumber-sumber literatur, peneliti akan melakukan seleksi yang cermat untuk memilih sumber-sumber yang paling relevan dan bermanfaat. Peneliti akan melakukan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang terpilih. Ini akan melibatkan pemahaman mendalam tentang temuan dan konsep yang muncul dalam literatur, serta mengidentifikasi pola atau tren yang berkaitan dengan peran kemitraan

swasta dalam Pembangunan ekonomi. Hasil analisis dan sintesis literatur akan digunakan untuk menyusun bagian-bagian artikel, termasuk latar belakang, kerangka teoritis, temuan utama, serta kesimpulan. Artikel akan disusun dengan berdasarkan informasi yang ditemukan dari sumber-sumber literatur yang telah ditinjau.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR INDONESIA

Sektor	Dana Pemerintah	Dana Pemerintah Lokal	BUMN	Swasta	Total
Jalan	340.0	200.0	65.0	200.0	805.0
Kereta Api	150.0	-	11.0	122.0	283.0
Laut	498.0	-	238.2	163.8	900.0
Udara	85.0	5.0	50.0	25.0	165.0
Darat	50.0	-	10.0	-	60.0
Perkotaan	90.0	15.0	5.0	5.0	115.0
Kelistrikan	100.0	-	445.0	435.0	980.0
Energi	3.6	-	151.5	351.5	506.6
Telekomunikasi dan TIK	12.5	15.3	27.0	223.0	277.8
Air	275.5	68.0	7.0	50.0	400.5
Sampah dan pengolahan	227.0	198.0	44.0	300	499.0
Perumahan	384.0	44.0	12.5	87.0	527.5
<b>Total</b>	<b>2,215.6</b>	<b>545.3</b>	<b>1,066.2</b>	<b>1,692.3</b>	<b>5,519.4</b>
Prosentase	40.1%	9.9%	19.3%	30.7%	100%

*Sumber: Bappenas dalam Rembuk Nasional 2017. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan & Menata Konektivitas Negeri.*

Berdasarkan gambar 1., tercatat perestase kebutuhan investasi infrastruktur. Dana pemerintah (40.1 persen), Dana pemerintah lokal (9,9 persen), BUMN (19,3 persen), dan Swasta (30.7persen). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia maupun suatu daerah. Infrastruktur juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Laju pertumbuhan dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi. Dengan adanya perkembangan dan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan studi Bank Dunia, setidaknya 30% dari proses pembangunan disumbang dari ketersediaan dan ketercukupan infrastruktur. Lebih lanjut, untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 %, dibutuhkan peningkatan investasi infrastruktur 20-30% dari anggaran yang ada. Selanjutnya beberapa studi juga menunjukkan pentingnya peran infrastruktur dalam pembangunan yang mana infrastruktur memiliki elastisitas berkisar 0,07 hingga 0,44 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya bahwa ketercukupan dan akses yang memadai terhadap infrastruktur berimplikasi positif terhadap pembangunan, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan daya saing dalam proses produksi dan pemberdayaan terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki suatu wilayah (Bahtiar Rifai, 2014).

Realitasnya, ketersediaan infrastruktur belum mencapai kondisi ideal untuk mendukung perekonomian. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur, terutama saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus didistribusi sebijaksana mungkin untuk membiayai pos-pos penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan hingga pos pertahanan keamanan. dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp1.923,7 Triliun untuk investasi selama tahun 2010 hingga 2014.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat melihat peran kemitraan pemerintah swasta dapat meningkatkan Pembangunan ekonomi dengan pusat perkembangan perekonomian adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan dana APBN atau APBD yang dimiliki oleh pemerintah menjadikan peranan pihak swasta dalam keterlibatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan serta dalam pembiayaan infrastruktur yang direncanakan pemerintah.

Pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang atau jasa. Namun, keuntungan yang diperoleh tentu bagi golongan atau individu yang terlibat. Meskipun demikian, pihak swasta membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara. Akan tetapi, bukan berarti bahwa swasta mengambil peranan penuh dalam pembiayaan infrastruktur melainkan peranan pemerintah harus dapat menjadi pihak regulator sangat diperlukan dalam mengontrol serta mengawal infrastruktur agar bisa digunakan dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardalepa, N. (2023). KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(1), 162-179.
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1).
- Hubudi, H., & Umar, H. (2010). Faktorfaktor Penentu Kesuksesan (Critical Success Factors) Pada Kerjasama Pemerintah Swasta Bidang Infrastruktur Di Indonesia. *Jurnal Publika*, 2(2), 130-164.